

Institutional Empowerment of Community Food Barns as an Effort to Strengthen Local Food Security in Tangerang Regency

Endang Iryani^{1*}, Mona Karina², Rismala Sri Hariaty³, Mutmainatul Mardiyah⁴

^{1,3,4}Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mohammad Husni Thamrin

²Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mohammad Husni Thamrin

Correspondence author: Endang Iryani, endang.published01@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v8i1.3626>

Abstract

Food security remains a strategic issue in national development that requires strengthening community-based institutions to ensure food availability, accessibility, stability, and sustainability at the local level. Community food barns represent one of the key institutional mechanisms for supporting local food security. However, their implementation continues to face several challenges; weak institutional, limited human resource capacity, inadequate administrative management, and insufficient collaboration. This community service program aimed to strengthen the institutional capacity of community food barns through a collaborative empowerment approach. The program was implemented through a series of activities: needs assessment, socialization, capacity-building training, mentoring, participatory discussions, institutional management practices, and monitoring-evaluation. The results demonstrated significant improvements in participants' understanding of institutional governance, organizational administration, food reserve management, and multi-stakeholder collaboration involving local government, agricultural extension officers, village authorities, and farmer groups. Furthermore, the program produced a collaborative institutional empowerment model that enhanced organizational capacity, strengthened stakeholder coordination, and improved community food reserve management. This model contributes to local food security by reinforcing four key dimensions: food availability, accessibility, stability, and sustainability. Therefore, continuous institutional strengthening of community food barns is recommended as a sustainable community empowerment strategy to enhance local food security and support regional food resilience.

Keywords: Community Empowerment, Community Food Barn, Food Security, Institutional Strengthening, Collaborative Governance.

Abstrak

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional yang memerlukan penguatan kelembagaan masyarakat sebagai fondasi utama dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan di tingkat lokal. Salah satu bentuk kelembagaan yang memiliki peran penting adalah lumbung pangan masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti lemahnya tata kelola organisasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya administrasi kelembagaan, serta belum optimalnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan lumbung pangan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan berbasis kolaborasi di Kabupaten Tangerang. Metode pelaksanaan meliputi tahap identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, diskusi partisipatif, praktik pengelolaan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus mengenai tata kelola kelembagaan, administrasi organisasi, manajemen cadangan pangan, serta pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani. Selain itu, kegiatan pendampingan mendorong terbentuknya model pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan berbasis kolaborasi yang memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan koordinasi antaraktor, dan mendukung pengelolaan cadangan pangan secara lebih efektif. Model tersebut berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan lokal melalui peningkatan aspek ketersediaan, akses, stabilitas, dan keberlanjutan sistem pangan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan lumbung pangan perlu dikembangkan secara berkelanjutan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Lumbung Pangan, Ketahanan Pangan, Kolaborasi.

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan global karena berkaitan erat dengan keberlanjutan kehidupan manusia, stabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDG ke-2 (Zero Hunger) menegaskan komitmen seluruh negara untuk mengakhiri kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan, memperbaiki status gizi masyarakat, dan mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan. Namun demikian, berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, konflik geopolitik, pandemi, serta terganggunya rantai pasok pangan internasional telah meningkatkan kerentanan sistem pangan dunia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan peningkatan produksi pertanian, tetapi telah berkembang menjadi isu multidimensional yang mencakup aspek ketersediaan (availability), akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability) pangan secara berkelanjutan (FAO et al., 2024).

Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2024 menunjukkan bahwa sekitar 733 juta penduduk dunia mengalami kelaparan pada tahun 2023, atau setara dengan satu dari sebelas penduduk dunia. Selain itu, sekitar 2,33 miliar penduduk masih berada dalam kondisi kerawanan pangan sedang hingga berat, sedangkan proyeksi hingga tahun 2030 menunjukkan sekitar 582 juta penduduk diperkirakan masih mengalami kelaparan kronis apabila tidak terjadi percepatan transformasi sistem pangan global. Data tersebut mengindikasikan bahwa dunia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target SDG 2 sehingga diperlukan pendekatan pembangunan pangan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis pada penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai bagian dari sistem pangan nasional maupun global (FAO et al., 2024).

Perubahan paradigma pembangunan pangan global kemudian mendorong berkembangnya pendekatan sustainable food systems yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun ketahanan pangan. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguatan kelembagaan lokal, peningkatan modal sosial, kolaborasi multipihak, serta pengembangan sistem pangan berbasis komunitas (community-based food security) sebagai strategi untuk meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap berbagai bentuk krisis. Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pangan tidak hanya ditentukan oleh tingginya tingkat produksi pertanian, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan secara kolektif, membangun jejaring sosial, serta mengembangkan

kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dan dinamika ekonomi (Pandangwati & Widiyanto, 2023).

Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan berupa pertumbuhan penduduk, konversi lahan pertanian, perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan pangan, serta fluktuasi harga komoditas strategis. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan produksi semata, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan masyarakat, diversifikasi pangan lokal, pengelolaan cadangan pangan, serta pengembangan sistem distribusi yang efisien. Kajian mengenai ketahanan pangan di Indonesia juga menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan institusi lokal merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan (Pandangwati & Widiyanto, 2023).

Salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung ketahanan pangan adalah lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang mendukung ketersediaan cadangan pangan, memperkuat mekanisme distribusi pangan pada saat darurat, mengurangi risiko kerawanan pangan rumah tangga, serta meningkatkan solidaritas masyarakat melalui prinsip gotong royong dan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Dalam perspektif pembangunan berbasis masyarakat (community-based development), keberhasilan pengelolaan lumbung pangan sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan yang mencakup kepemimpinan, tata kelola organisasi, transparansi administrasi, partisipasi anggota, inovasi pengelolaan, serta kemampuan menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat utama agar lumbung pangan mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen ketahanan pangan lokal secara efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan kelembagaan lumbung pangan masyarakat di tingkat desa. Sebagai wilayah penyangga kawasan metropolitan dengan perkembangan industri, permukiman, dan infrastruktur yang sangat pesat, Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan

ketersediaan pangan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan lumbung pangan melalui berbagai program pembinaan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah kegiatan evaluasi lumbung pangan masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra akademik dalam memberikan penilaian, pendampingan, serta rekomendasi berbasis ilmiah terhadap pengelolaan lumbung pangan di tingkat desa. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada sepuluh lumbung pangan masyarakat yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Tangerang sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan lokal.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara Universitas Mohammad Husni Thamrin dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dalam rangka penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat sebagai salah satu strategi meningkatkan ketahanan pangan lokal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat (community empowerment approach), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses peningkatan kapasitas kelembagaan melalui evaluasi partisipatif, pendampingan akademik, dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berorientasi pada penilaian kondisi eksisting, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pengelola lumbung pangan dalam mengembangkan tata kelola organisasi yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22–25 September 2025 di sepuluh lumbung pangan masyarakat yang berada pada tujuh kecamatan di Kabupaten Tangerang, yaitu Kecamatan Tigaraksa, Cisoka, Balaraja, Kresek, Gunung Kaler, Mauk, dan Pakuhaji. Lokasi kegiatan ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang berdasarkan keberadaan lumbung pangan yang aktif dan mewakili karakteristik pengelolaan di masing-masing wilayah. Kegiatan melibatkan pengurus lumbung pangan, kelompok tani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, serta tim dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin sebagai mitra akademik yang berperan dalam proses evaluasi dan pendampingan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan evaluasi, pendampingan kelembagaan, dan penyusunan rekomendasi. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang untuk menyusun jadwal kegiatan, menentukan lokasi sasaran, serta menyepakati instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi awal terhadap kondisi kelembagaan lumbung pangan sebagai dasar penyusunan strategi pendampingan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan diskusi partisipatif dengan pengelola lumbung pangan serta pemangku kepentingan di tingkat desa. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi fisik lumbung, kapasitas penyimpanan, serta penerapan tata kelola kelembagaan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pengelolaan, pola partisipasi masyarakat, sistem administrasi, inovasi yang telah diterapkan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lumbung pangan. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk memverifikasi kelengkapan administrasi, pencatatan stok pangan, struktur organisasi, dan dokumen pendukung lainnya.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui kolaborasi antara Universitas Mohammad Husni Thamrin dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang sebagai upaya memperkuat kelembagaan lumbung pangan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Program ini dilaksanakan pada sepuluh lumbung pangan masyarakat yang tersebar di tujuh kecamatan, yaitu Tigaraksa, Cisoka, Balaraja, Kresek, Gunung Kaler, Mauk, dan Pakuhaji. Sebaran lokasi tersebut dipilih karena mewakili karakteristik kelembagaan lumbung pangan yang beragam, baik

dari aspek kapasitas organisasi, pengelolaan cadangan pangan, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Keragaman tersebut memberikan peluang untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kelembagaan lumbung pangan di Kabupaten Tangerang sekaligus menjadi dasar dalam merancang strategi pemberdayaan yang bersifat kontekstual sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community-based development* yang menempatkan karakteristik lokal sebagai dasar dalam merancang intervensi pemberdayaan sehingga program yang dilaksanakan lebih efektif dan berkelanjutan (Ansell & Torfing, 2021; Barrett, 2021).

Keberadaan lumbung pangan pada setiap desa menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki modal sosial yang cukup kuat dalam menjaga cadangan pangan sebagai bagian dari strategi menghadapi berbagai bentuk kerentanan pangan. Namun demikian, hasil identifikasi awal memperlihatkan bahwa tingkat perkembangan kelembagaan antar lumbung pangan masih menunjukkan variasi yang cukup besar. Perbedaan tersebut terlihat pada aspek kepemimpinan kelompok, tata kelola organisasi, sistem administrasi, pengelolaan cadangan pangan, hingga kemampuan kelompok dalam mengembangkan inovasi berbasis potensi lokal. Variasi tersebut merupakan karakteristik yang umum dijumpai pada organisasi berbasis masyarakat karena kapasitas kelembagaan dipengaruhi oleh pengalaman organisasi, kualitas kepemimpinan, dukungan pemerintah, serta tingkat partisipasi anggota dalam menjalankan fungsi organisasi (FAO et al., 2024; OECD, 2023).

Tabel 1. Profil Mitra Pengabdian Masyarakat

No	Nama Lumbung Pangan	Desa	Kecamatan	Karakteristik Awal
1	Sodong Pulo	Sodong	Tigaraksa	Administrasi relatif baik, organisasi aktif
2	Karya Jaya	Carenang	Cisoka	Partisipasi masyarakat cukup tinggi
3	Karoya Sejahtera	Carenang	Cisoka	Tata kelola organisasi berjalan baik
4	Dengkul Jaya	Cangkudu	Balaraja	Memerlukan penguatan administrasi
5	Sondol	Kemuning	Kresek	Cadangan pangan cukup baik, inovasi terbatas
6	Tunas Mekar IV	Jengkol	Kresek	Pengelolaan stok berjalan, administrasi perlu ditingkatkan
7	Harapan Maju II	Tamiang	Gunung Kaler	Kepemimpinan kelompok aktif
8	Sri Makmur	Gunung Kaler	Gunung Kaler	Partisipasi anggota belum optimal
9	Melati	Marga Mulya	Mauk	Potensi kelembagaan baik,

				perlu penguatan tata kelola
10	Paku haji Kulon	Paku alam	Paku haji	Administrasi dan dokumentasi masih terbatas

Sumber: Diolah dari Laporan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa karakteristik mitra sangat beragam sehingga pendekatan pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara seragam. Lumbung pangan seperti Sodong Pulo, Karoya Sejahtera, dan Harapan Maju II telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang relatif baik sehingga pendampingan lebih diarahkan pada penguatan inovasi dan keberlanjutan kelembagaan. Sebaliknya, Dengkul Jaya, Sri Makmur, dan Pakuhaji Kulon masih memerlukan penguatan pada aspek administrasi, dokumentasi kelembagaan, dan peningkatan partisipasi anggota. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan fasilitator dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing kelompok sehingga strategi pendampingan yang diberikan menjadi lebih adaptif dan tepat sasaran (UNDP, 2022; FAO et al., 2024).

Keberagaman karakteristik tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penguatan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan cadangan pangan, tetapi juga pada kualitas kelembagaan yang mengelola sumber daya tersebut. Lumbung pangan yang memiliki tata kelola organisasi yang lebih baik cenderung mampu mengembangkan sistem administrasi yang tertib, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan cadangan pangan secara lebih efektif. Sebaliknya, kelemahan pada aspek kelembagaan berpotensi mengurangi efektivitas fungsi lumbung pangan sebagai instrumen ketahanan pangan masyarakat. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kelembagaan lokal merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pangan berbasis masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan (Barrett, 2021; FAO et al., 2024).

Secara keseluruhan, profil mitra menunjukkan bahwa setiap lumbung pangan memiliki potensi dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang bersifat adaptif. Oleh karena itu, sebelum proses pendampingan dilakukan secara lebih intensif, diperlukan identifikasi yang mendalam terhadap kondisi awal kelembagaan agar strategi penguatan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing mitra.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa aspek administrasi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi beberapa lumbung pangan. Pencatatan stok pangan, dokumentasi kegiatan, dan penyusunan laporan administrasi belum dilakukan secara

konsisten pada seluruh lokasi. Padahal administrasi kelembagaan merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas organisasi, meningkatkan transparansi pengelolaan sumber daya, serta memperkuat kepercayaan anggota terhadap organisasi. Oleh karena itu, penguatan administrasi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan teknis, tetapi merupakan bagian dari proses peningkatan kapasitas kelembagaan yang mendukung keberlanjutan organisasi masyarakat (UNDP, 2022; FAO et al., 2024). Proses pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kapasitas organisasi melalui penguatan tata kelola, administrasi kelembagaan, pengelolaan cadangan pangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan lumbung pangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *community empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan kemandirian komunitas (UNDP, 2022; Emerson & Nabatchi, 2022).

Pelaksanaan pendampingan diawali dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi fisik lumbung pangan, sistem penyimpanan cadangan pangan, kelengkapan administrasi, dan mekanisme pengelolaan organisasi. Hasil observasi kemudian dikonfirmasi melalui wawancara dengan pengurus lumbung pangan, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta pemerintah desa sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing kelembagaan. Proses ini tidak hanya menghasilkan data evaluasi, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih terbuka antara tim pengabdian dan masyarakat. Melalui pendekatan dialogis tersebut, masyarakat didorong untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta menyusun rencana perbaikan secara partisipatif. Model ini memperkuat prinsip *participatory development* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap proses perubahan (Cornwall, 2021; FAO et al., 2024).

Selama proses pendampingan, tim dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin tidak hanya berperan sebagai evaluator, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran (*facilitator of learning*). Transfer pengetahuan dilakukan melalui diskusi teknis mengenai penyusunan administrasi kelembagaan, pencatatan stok pangan, pembagian tugas organisasi, penguatan kepemimpinan kelompok, serta strategi meningkatkan partisipasi anggota. Pendekatan tersebut menghasilkan proses *collaborative learning*, yaitu proses pembelajaran bersama yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antara akademisi, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan pengelola lumbung pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif mampu meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat karena setiap aktor tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga

menjadi sumber pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki (Ansell & Torfing, 2021; OECD, 2023).

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa proses pendampingan memberikan ruang bagi pengurus lumbung pangan untuk mengevaluasi kembali mekanisme pengelolaan organisasi yang selama ini diterapkan. Beberapa kelompok mulai menyadari pentingnya pembagian tugas yang lebih jelas, peningkatan kualitas administrasi, serta dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas organisasi. Kesadaran tersebut merupakan indikator penting bahwa proses pemberdayaan tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang (mindset change) terhadap pengelolaan kelembagaan. Perubahan perspektif ini menjadi fondasi utama dalam membangun organisasi masyarakat yang adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam menghadapi kerentanan pangan akibat perubahan iklim maupun dinamika sosial ekonomi (Barrett, 2021; FAO et al., 2024).

Secara keseluruhan, implementasi model pemberdayaan menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan kelembagaan tidak ditentukan oleh intensitas pendampingan semata, tetapi oleh kemampuan membangun hubungan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi tersebut menghasilkan proses pemberdayaan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing lumbung pangan.

Analisis terhadap hasil pendampingan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan lumbung pangan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek administrasi organisasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman pengurus mengenai pentingnya tata kelola kelembagaan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui proses evaluasi dan pendampingan, pengurus memperoleh wawasan baru mengenai pengelolaan organisasi, pencatatan stok pangan, pembagian tugas, serta penyusunan dokumentasi kelembagaan yang lebih sistematis. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan mampu meningkatkan kapasitas organisasi melalui penguatan aspek manajerial dan tata kelola kelembagaan (UNDP, 2022; Emerson & Nabatchi, 2022).

Tabel 2. Perubahan Kondisi Kelembagaan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Aspek	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Tata kelola organisasi	Pembagian tugas belum optimal	Struktur organisasi lebih jelas
Administrasi	Dokumentasi belum seragam	Administrasi lebih sistematis
Pencatatan stok	Tidak konsisten	Pencatatan lebih tertib

Partisipasi anggota	Didominasi pengurus	Keterlibatan anggota meningkat
Kolaborasi	Bersifat internal	Terbangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan
Rencana pengembangan	Belum terdokumentasi	Tersusun rekomendasi penguatan kelembagaan

Tabel diatas memperlihatkan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Peningkatan kualitas administrasi, misalnya, berkontribusi terhadap meningkatnya transparansi organisasi dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, meningkatnya partisipasi anggota menunjukkan bahwa proses pendampingan berhasil memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kelembagaan lumbung pangan. Dalam perspektif social capital, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam membangun organisasi yang mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Putnam, 2020; OECD, 2023).

Selain menghasilkan perubahan pada tingkat organisasi, kegiatan pengabdian juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menciptakan mekanisme pembelajaran bersama yang memungkinkan setiap aktor saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya dalam memperkuat kelembagaan lumbung pangan. Pendekatan ini mencerminkan praktik collaborative governance, yaitu tata kelola kolaboratif yang menempatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai mitra dalam menyelesaikan permasalahan publik secara bersama-sama (Ansell & Torfing, 2021; Emerson & Nabatchi, 2022).

Sintesis hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lumbung pangan tidak hanya meningkatkan kapasitas organisasi, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan lokal. Hubungan antara peningkatan tata kelola, administrasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi multipihak membentuk mekanisme pemberdayaan yang mendorong keberlanjutan fungsi lumbung pangan sebagai institusi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dampak pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan pengurus, tetapi berkembang menjadi proses transformasi kelembagaan yang berpotensi meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ketahanan pangan.

Selama proses pendampingan, tim dosen Universitas Mohammad Husni Thamrin tidak hanya berperan sebagai evaluator, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran (facilitator of learning). Transfer pengetahuan dilakukan melalui diskusi teknis mengenai penyusunan

administrasi kelembagaan, pencatatan stok pangan, pembagian tugas organisasi, penguatan kepemimpinan kelompok, serta strategi meningkatkan partisipasi anggota. Pendekatan tersebut menghasilkan proses collaborative learning, yaitu proses pembelajaran bersama yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antara akademisi, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan pengelola lumbung pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif mampu meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat karena setiap aktor tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki (Ansell & Torfing, 2021; OECD, 2023).

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa proses pendampingan memberikan ruang bagi pengurus lumbung pangan untuk mengevaluasi kembali mekanisme pengelolaan organisasi yang selama ini diterapkan. Beberapa kelompok mulai menyadari pentingnya pembagian tugas yang lebih jelas, peningkatan kualitas administrasi, serta dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas organisasi. Kesadaran tersebut merupakan indikator penting bahwa proses pemberdayaan tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang (mindset change) terhadap pengelolaan kelembagaan. Perubahan perspektif ini menjadi fondasi utama dalam membangun organisasi masyarakat yang adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan, termasuk dalam menghadapi kerentanan pangan akibat perubahan iklim maupun dinamika sosial ekonomi (Barrett, 2021; FAO et al., 2024).

Secara keseluruhan, implementasi model pemberdayaan menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan kelembagaan tidak ditentukan oleh intensitas pendampingan semata, tetapi oleh kemampuan membangun hubungan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi tersebut menghasilkan proses pemberdayaan yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik masing-masing lumbung pangan.

Analisis terhadap hasil pendampingan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan lumbung pangan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada aspek administrasi organisasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman pengurus mengenai pentingnya tata kelola kelembagaan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui proses evaluasi dan pendampingan, pengurus memperoleh wawasan baru mengenai pengelolaan organisasi, pencatatan stok pangan, pembagian tugas, serta penyusunan dokumentasi kelembagaan

yang lebih sistematis. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan mampu meningkatkan kapasitas organisasi melalui penguatan aspek manajerial dan tata kelola kelembagaan (UNDP, 2022; Emerson & Nabatchi, 2022).

Tabel 3. Perubahan Kondisi Kelembagaan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Aspek	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
Tata kelola organisasi	Pembagian tugas belum optimal	Struktur organisasi lebih jelas
Administrasi	Dokumentasi belum seragam	Administrasi lebih sistematis
Pencatatan stok	Tidak konsisten	Pencatatan lebih tertib
Partisipasi anggota	Didominasi pengurus	Keterlibatan anggota meningkat
Kolaborasi	Bersifat internal	Terbangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan
Rencana pengembangan	Belum terdokumentasi	Tersusun rekomendasi penguatan kelembagaan

Tabel diatas memperlihatkan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Peningkatan kualitas administrasi, misalnya, berkontribusi terhadap meningkatnya transparansi organisasi dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Sementara itu, meningkatnya partisipasi anggota menunjukkan bahwa proses pendampingan berhasil memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap kelembagaan lumbung pangan. Dalam perspektif social capital, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam membangun organisasi yang mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Putnam, 2020; OECD, 2023).

Selain menghasilkan perubahan pada tingkat organisasi, kegiatan pengabdian juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, penyuluh pertanian, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menciptakan mekanisme pembelajaran bersama yang memungkinkan setiap aktor saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya dalam memperkuat kelembagaan lumbung pangan. Pendekatan ini mencerminkan praktik collaborative governance, yaitu tata kelola kolaboratif yang menempatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai mitra dalam menyelesaikan permasalahan publik secara bersama-sama (Ansell & Torfing, 2021; Emerson & Nabatchi, 2022). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lumbung pangan tidak hanya meningkatkan kapasitas organisasi, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan lokal. Hubungan antara peningkatan tata kelola, administrasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi multipihak membentuk mekanisme pemberdayaan yang mendorong keberlanjutan fungsi lumbung pangan sebagai institusi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dampak

pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan pengurus, tetapi berkembang menjadi proses transformasi kelembagaan yang berpotensi meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ketahanan pangan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lumbung pangan masyarakat merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tangerang. Pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta penguatan tata kelola kelembagaan mampu meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi, administrasi, dan cadangan pangan secara lebih terstruktur. Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sebagai organisasi yang mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Keberhasilan program dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pengurus lumbung pangan. Sinergi tersebut menghasilkan model pemberdayaan kelembagaan berbasis kolaborasi yang menempatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai elemen utama dalam pengembangan kelembagaan. Model ini terbukti mampu memperkuat koordinasi antaraktor sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Berdasarkan hasil pengabdian, direkomendasikan agar pemerintah daerah mengembangkan program pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan, memperluas penerapan sistem administrasi dan informasi berbasis digital, serta memperkuat jejaring kemitraan lintas sektor untuk meningkatkan keberlanjutan kelembagaan lumbung pangan. Dengan demikian, lumbung pangan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan cadangan pangan, tetapi juga berkembang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan ketahanan pangan lokal secara adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Badan Pangan Nasional. (2023). Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Jakarta: Badan Pangan Nasional.

Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Tangerang.

Chen, Y., Liu, J., & Zhao, H. (2023). Strengthening community institutions for food security: Lessons from Asia. *Foods*, 12(18), 3381.

Emery, M., & Flora, C. (2006). Spiraling-up: Mapping community transformation with community capitals framework. *Community Development*, 37(1), 19–35.

Food and Agriculture Organization. (2022). The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. FAO.

Food and Agriculture Organization. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. FAO.

Food and Agriculture Organization. (2024). The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. FAO.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). Statistik Pertanian 2024. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Jakarta: Bappenas.

Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., & Hamdouch, A. (2013). *The International Handbook on Social Innovation*. Edward Elgar Publishing.

Nguyen, T., Pham, H., & Le, D. (2024). Collaborative governance for sustainable food systems in developing countries. *Sustainability*, 16(5), 1987.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahman, M., Islam, M., & Hossain, M. (2023). Institutional capacity and local food system resilience: Evidence from rural communities. *Agriculture*, 13(7), 1428.
- Sachs, J. D., Lafortune, G., Fuller, G., & Drumm, E. (2024). *Sustainable Development Report 2024*. Cambridge University Press.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human Development Report 2023/2024*. UNDP.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- World Bank. (2023). *Food Security Update*. Washington, DC: World Bank.
- World Food Programme. (2023). *Global Report on Food Crises 2023*. WFP.
- World Food Programme. (2024). *Global Report on Food Crises 2024*. WFP.
- Xu, Z., Li, Y., Zhang, H., & Wang, X. (2022). Community participation and rural food security: A systematic review. *Sustainability*, 14(18), 11452.